

---

## **DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH: PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**

Sherley M. Ulimpa<sup>1\*</sup>, Agustinus Salle<sup>2</sup>, Maylen K. P. Kambuaya<sup>3</sup>

<sup>1\*23</sup> *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*

*\*Corresponding Author*

### **Abstract**

*Budget absorption is one of the indicators of the success of programs or policies implemented by the government (Anfujatin., 2016). Budget realization that is close to the budget plan shows that the allocation of funds has been absorbed through various programs and activities that have been planned. This budget absorption refers to the ability of the Regional Government to realize the budget in accordance with the provisions stated in the APBD. This study aims to identify the main obstacles in budget absorption in the Sorong Regency Government, especially related to the procurement process of goods and services. In addition, this study also analyzes factors such as budget planning and human resource competence that affect the absorption of local government budgets in the procurement of goods and services. The research was conducted on 32 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Sorong Regency. The sample consisted of one Financial Administration Officer (PPK) and one Activity Technical Implementation Officer (PPTK) from each OPD. The method used is a survey, with data collected through questionnaires which are then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that the variables of human resource competence (HR) and budget implementation have a significant influence on the absorption of SKPD expenditure budgets. However, the budget planning variable does not have a significant influence on the absorption of the SKPD budget. Simultaneously, human resource competence, budget planning, and budget implementation together have a significant influence on the absorption of the budget.*

**Keywords:** *Human Resources Competence, Budget Implementation, Budget Planning, and Budget Absorption.*

### **Abstrak**

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator keberhasilan program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Anfujatin., 2016). Realisasi anggaran yang mendekati rencana anggaran menunjukkan bahwa alokasi dana telah terserap melalui berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran ini mengacu pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama dalam penyerapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor seperti perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia yang memengaruhi penyerapan anggaran pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian dilakukan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sorong. Sampel terdiri dari satu

---

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan satu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari masing-masing OPD. Metode yang digunakan adalah survei, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD. Namun, variabel perencanaan anggaran tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD. Secara simultan, kompetensi SDM, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan anggaran bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

**Kata Kunci:** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Penyerapan Anggaran Belanja.

### **Pendahuluan**

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin., 2016). Deviasi pada realisasi terhadap anggaran membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan didalam APBD.

Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator utama efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang optimal mencerminkan bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan daerah. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, penyerapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa proses pengadaan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam penyerapan anggaran dapat menyebabkan dana tidak digunakan secara maksimal, menghambat perkembangan proyek, dan pada akhirnya, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat (Handayani, 2020).

Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah perencanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, serta faktor sumber daya manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Malahayati, 2015) yang menemukan bahwa kapasitas SDM, perencanaan dan proses pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Faktor-faktor ini digunakan oleh OPD dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa. Namun, dikarenakan banyaknya persolan yang terjadi pada OPD, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pelaksanaannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan efektif dan efisien yang akan berdampak pada optimalnya penyerapan anggaran yang direncanakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari kegiatan pengadaan barang/jasa. Semakin lemah sumber daya manusia, maka akan

memperlambat penyerapan anggaran, sebaliknya jika sumber daya manusia semakin baik maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Hasni, N. T., & Basukianto, 2016).

Dalam penelitian (Alimuddin, 2018) menjelaskan faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja.

Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan anggaran. (Noviwijaya, Amdi dan Rohman, 2013) mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Hasil penelitian (Ramdhani, D., & Anisa, I, 2017) dan (Zarinah, M., Darwanis., & Abdullah, 2016) menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dengan proses pengadaan barang/jasa yang baik akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan proses bisnis yang terkait di atas maka pastinya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Fenomena Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Kabupaten Sorong dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan dan Jasa yang bernaung di bawah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sendiri terbentuk pada tahun 2015 dengan fungsi melakukan proses tender pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya bersumber dari anggaran daerah, anggaran negara, hibah atau dana luar negeri di Kabupaten Sorong. Namun media yang sama melaporkan pula pada tahun 2022, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa baru menyelesaikan paket melalui proses tender dari total paket di usulkan, sehingga persentase jumlah paket yang telah di rampungkan tak sebanding dengan serapan anggaran triwulan I tahun 2022 yang hanya menyentuh sekitar 80 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di atas antara lain: (a) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahap pembuatan kontrak/surat perjanjian yang terlambat/gagal/ulang/terhentikan proses tender. (b) Waktu penyelesaian pekerjaan oleh Mitra/Penyedia sehingga proses pembayaran atau penyerapan anggaran juga terlambat. (c) Dokumen persyaratan pembayaran yang disiapkan oleh Mitra/Penyedia tidak lengkap. (d) Penetapan dan ketersediaan anggaran dari Pemda yang terlambat (terbit di pertengahan atau akhir tahun anggaran). (e) Perencanaan kegiatan yang belum optimal (kajian kelayakan proyek tidak akurat) sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan kegiatan tambahan (amandemen/addendum).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meninjau terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sorong dengan judul penelitian “**Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Sorong**”.

## **Kajian Pustaka**

### ***Stewardship Theory***

Stewardship theory mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori stewardship, manager akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Bria, 2019).

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manager meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian, bukan berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup (Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, 2017:54). Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas yang merupakan konsep lebih luas dari stewardship merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (steward) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### **Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan anggaran. Noviwijaya, Amdi dan Rohman, (2013) mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran adalah konsep yang menggambarkan sejauh mana alokasi dana yang telah direncanakan dan disetujui dalam anggaran pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan perencanaan, sementara penyerapan yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam implementasi program atau proyek yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang kurang matang, masalah birokrasi, atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran seperti perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, birokrasi, dan pengawasan dan evaluasi. Teori penyerapan anggaran sering dikaitkan dengan teori pengelolaan keuangan publik dan teori implementasi kebijakan. Pengelolaan keuangan publik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Sementara itu, teori implementasi kebijakan

menyoroti bagaimana kebijakan dan program diimplementasikan secara efektif melalui koordinasi yang baik antara berbagai aktor dan lembaga yang terlibat.

### **Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran pemerintah merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Proses ini sangat penting karena menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan serta operasional pemerintah. Perencanaan anggaran yang efektif adalah fondasi dari pengelolaan keuangan publik yang baik, karena berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan fiskal, ekonomi, dan sosial.

Perencanaan yang matang dan realistis sangat penting untuk penyerapan anggaran yang optimal. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, perencanaan proyek, dan alokasi dana yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Perencanaan yang buruk dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat dan penyerapan anggaran yang rendah (Ariyanto, H., & Utomo, 2019).

### **Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran pemerintah merujuk pada proses realisasi atau penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam anggaran negara atau daerah untuk berbagai program dan kegiatan. Proses ini mencakup semua langkah dari pengeluaran dana hingga pencatatan dan pelaporan hasilnya. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan serta memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.

Pelaksanaan anggaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Proses ini mempengaruhi pencapaian hasil pembangunan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengelolaan anggaran yang baik juga membantu dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan fiskal serta mengurangi risiko pemborosan dan penyimpangan (Kusuma, W., & Ariani, 2018).

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintah adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan oleh pegawai pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa layanan publik diberikan dengan kualitas tinggi, transparan, dan akuntabel.

### **Pengadaan Barang dan Jasa**

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah dalam pelaksanaan program dan proyeknya. Proses ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan bahwa barang atau jasa yang diperoleh memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Proses pengadaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi standar kualitas yang diperlukan dan digunakan secara efisien. Pengadaan yang transparan dan akuntabel membantu mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan cara yang tepat. Proses ini juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik (Wibowo, S., & Nugroho, 2021).

### **Pengembangan Hipotesis**

Bagian ini menguraikan pengembangan tiga hipotesis, sebagai berikut:

#### *Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran*

Hasil penelitian (Wibowo, A., & Prabowo, 2022) penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi SDM yang tinggi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, berperan penting dalam meningkatkan penyerapan anggaran. SDM yang kompeten mampu merencanakan dan melaksanakan anggaran dengan lebih efisien. Hasil penelitian (Kusuma, W., & Ariani, 2018) penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pegawai, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan manajerial, berkontribusi positif terhadap penyerapan anggaran. Pelatihan dan pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Hasil penelitian (Amalia, D., Setiawan, R., & Fadillah, 2020) menyatakan bahwa meskipun SDM memiliki kompetensi yang cukup baik, kendala dalam mekanisme birokrasi dan keterbatasan koordinasi antar unit kerja lebih berperan dalam menghambat optimalisasi penyerapan anggaran. Hal serupa diungkapkan oleh (Pratama, Y. D., & Nugroho, 2019) yang menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti perubahan kebijakan dan teknis pelaksanaan penganggaran lebih dominan dalam memengaruhi tingkat serapan anggaran dibandingkan faktor internal seperti kompetensi SDM. Selain itu, penelitian oleh (Hidayat, M. A., Saputra, A., & Fitria, 2018) menemukan bahwa ketidaksesuaian jadwal perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta prosedur administrasi yang kompleks sering kali menjadi penghambat utama dalam penyerapan anggaran, terlepas dari kemampuan individu dalam pengelolaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, dapat dirumuskan dalam hipotesis:

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

#### *Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran*

Hasil penelitian (Hadi, S., & Sari, 2017) penelitian ini menemukan bahwa perencanaan anggaran yang baik dan terperinci berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan yang tepat dan alokasi dana yang rasional dapat meningkatkan efektivitas penggunaan

anggaran. Hasil penelitian (Halim, A., & Putra, 2020) menunjukkan bahwa baik perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin dapat meminimalkan risiko anggaran tidak terserap. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rustam., 2016) mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam penyerapan anggaran lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan penundaan proses Ganti Uang Persediaan (GUP), yang tidak terkait langsung dengan perencanaan anggaran. Selain itu, penelitian oleh (Ramdhani, D., & Anisa, 2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap penyerapan anggaran dibandingkan dengan perencanaan anggaran itu sendiri. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan ialah:

H2 : Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

### *Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2020) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran memiliki dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai prosedur dapat meningkatkan tingkat penyerapan anggaran dan mengurangi sisa anggaran yang tidak terpakai. Hasil penelitian (Halim, A., & Putra, 2020) menunjukkan bahwa baik perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin dapat meminimalkan risiko anggaran tidak terserap. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, R., & Lestari, 2019) yang menemukan bahwa kendala administratif dan kebijakan yang sering berubah menjadi faktor yang lebih memengaruhi rendahnya penyerapan anggaran dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran itu sendiri. Meskipun tahapan pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik, hambatan dalam proses verifikasi dan pengadaan barang/jasa lebih dominan menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, A. D., Nugroho, H., & Syamsudin, 2021) menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran sering kali dimediasi oleh faktor eksternal, seperti keterlambatan pencairan dana oleh pihak ketiga dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan anggaran dilakukan secara efektif, hal tersebut tidak secara otomatis berdampak pada peningkatan penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di 32 Kantor OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis pendekatan survey. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dimana sampel yang diambil ialah informan kunci dari

kantor OPD di Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di 32 kantor OPD di Pemerintah Kabupaten Sorong. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah pembagian kuesioner secara langsung kepada para informan. Alat analisis data yang digunakan ialah SPSS 21 sebagai alat pegujian statistic data.

## Hasil Dan Pembahasan

Langkah pertama ialah pengujian statistic deskriptif terhadap data sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMP.SDM_X1	50	19	25	22.04	1.958
PRCN.AGGRN_X2	50	20	25	21.82	1.987
PLKSN.ANGGRN_X3	50	20	25	22.16	1.719
PYRPN.AGGRN_Y	50	20	25	22.04	1.818
Valid N (listwise)	50				

Sumber: *Data diolah, 2024*

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa nilai variabel kompetensi SDM (X1) memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata yaitu 22.04 dan nilai standar deviation yaitu sebesar 1.958.

Selanjutnya, variabel perencanaan anggaran (X2) memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata yaitu 21.82 dan nilai standar deviation yaitu sebesar 1.987. Selanjutnya, variabel pelaksanaan anggaran (X3) memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata yaitu 22.16 dan nilai standar deviation yaitu sebesar 1.719. Kemudian, variabel penyerapan anggaran (Y) dengan nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata yaitu 22,04 dan nilai standar deviation yaitu sebesar 1.818.

Berdasarkan tabel dibawah ini, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.10 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,736 lebih besar dari  $\alpha$  (0.05). Diambil keputusan terima  $H_0$  yang artinya persebaran dari variabel kompetensi SDM (X1), variabel perencanaan anggaran (X2), variabel pelaksanaan anggaran, dan variabel penyerapan anggaran (Y) berdistribusi dengan normal.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**



### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27525138
	Absolute	.097
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.685
Asymp. Sig. (2-tailed)		.736

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Data diolah, 2024*

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah nilai 10 model regresi dinyatakan telah memenuhi asumsi multikolinieritas.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.971	2.652		1.497	.141		
1							
KOMP.SDM_X1	.275	.118	.296	2.332	.024	.665	1.504
PRCN.AGGRN X2	.070	.124	.076	.565	.575	.584	1.712
PLKSN.ANGGRN_X3	.473	.156	.448	3.044	.004	.495	2.021

a. Dependent Variable: PYRPN.AGGRN Y

Sumber: *Data diolah, 2024*

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10

yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh semua variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10. Dan untuk hasil perhitungan nilai variance inflation faktor (VIF) menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu variabel Kompetensi SDM (X1) senilai 1.504, variabel Perencanaan Anggaran (X2) senilai 1.712, dan variabel Pelaksanaan Anggaran senilai 2.021. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Pada penelitian ini dilakukan uji glejser untuk menunjukkan heteroskedastisitas. Model dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas jika variabel bebas berpengaruh signifikan secara statistik terhadap residual absolut. Pada saat menguji persamaan regresi, ditemukan bahwa model dipengaruhi oleh heteroskedastisitas. Dikatakan terjadi heteroskedastisitas jika nilai variabel independen signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-2.465	1.406		-1.753	.086
	KOMP.SDM X1	.196	.062	.505	3.146	.003
	PRCN.ANGGRN X2	.002	.066	.006	.035	.973
	PLKSN.ANGGRN X3	-.041	.082	-.092	-.494	.624

a. Dependent Variable: Abs\_Res  
Sumber: *Data diolah*, 2024

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap residual absolut. Nilai signifikansi (Sig.) untuk masing-masing variabel independen, yaitu penerapan Kompetensi SDM (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0.196 dengan nilai t sebesar 3.146 dan tingkat signifikansi 0.003. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan hubungan positif. Artinya, peningkatan kompetensi SDM berkontribusi secara positif terhadap perubahan variabel dependen. Variabel Perencanaan Anggaran (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0.002 dengan nilai t sebesar 0.035 dan tingkat signifikansi 0.973. Karena nilai signifikansi jauh di atas 0.05, variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga perencanaan anggaran tidak menjadi faktor yang menentukan. Sedangkan, variabel Pelaksanaan Anggaran (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0.041 dengan nilai t sebesar -0.494 dan tingkat signifikansi 0.624. Sama seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Abs\_Res).

## Pengujian Hipotesis

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial

Model		c				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.971	2.652		1.497	.141
	KOMP.SDM_X1	.275	.118	.296	2.332	.024
	PRCN.AGGRN_X2	.070	.124	.076	.565	.575
	PLKSN.ANGGRN_X3	.473	.156	.448	3.044	.004

a. Dependent Variable: PYRPN.AGGRN\_Y

Sumber: *Data diolah*, 2024 (Lampiran 3)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi, terlihat bahwa variabel Komp. SDM dan Pelaksanaan Anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pemerintah daerah pada proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas dari variabel yang memiliki nilai t atau signifikansi <0,05 yaitu variabel Kompetensi SDM sebesar 0.024 dan variabel Pelaksanaan Anggaran sebesar 0.004.

Sedangkan, variabel Perencanaan Anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pemerintah daerah pada proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas dari variabel yang memiliki nilai t atau signifikansi >0,05 yaitu sebesar 0.575. Sehingga dengan melihat hasil analisis unstandardized coefficient pada tabel 4.14 maka dapat disimpulkan persamaan berikut: Penyerapan Anggaran Belanja = 3.971 + 0.275Komp. SDM + 0.070Prcn. Anggrn+ 0.473Plksn.Anggrn + e

Hipotesis pertama yang menyatakan variabel kompetensi SDM (KOMP. SDM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Wibowo, A., & Prabowo, 2022) yang mengungkapkan bahwa kompetensi SDM yang tinggi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, berperan penting dalam meningkatkan penyerapan anggaran. SDM yang kompeten mampu merencanakan dan melaksanakan anggaran dengan lebih efisien. Hal yang sama juga dijelaskan oleh (Kusuma, W., & Ariani, 2018) bahwa kompetensi pegawai, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan manajerial, berkontribusi positif terhadap penyerapan anggaran. Pelatihan dan pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

Kompetensi SDM memainkan peran penting dalam memastikan penyerapan anggaran belanja yang optimal, dan hal ini sejalan dengan teori stewardship. Dalam teori ini, SDM yang kompeten bertindak sebagai steward yang secara bertanggung jawab, profesional, dan proaktif mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana tanggung jawab dan kompetensi SDM berdampak langsung pada keberhasilan pengelolaan anggaran.

Hipotesis kedua, terlihat bahwa variabel perencanaan anggaran (PRCN.ANGGRN) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Malahayati, 2015) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hadi, S., & Sari, 2017) yang menemukan bahwa perencanaan anggaran yang baik dan terperinci berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan yang tepat dan alokasi dana yang rasional dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak dapat mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Halim, A., & Putra, 2020) yang menunjukkan bahwa baik perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin dapat meminimalkan risiko anggaran tidak terserap. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rustam., 2016) mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam penyerapan anggaran lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan penundaan proses Ganti Uang Persediaan (GUP), yang tidak terkait langsung dengan perencanaan anggaran. Selain itu, penelitian oleh (Ramdhani, D., & Anisa, 2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap penyerapan anggaran dibandingkan dengan perencanaan anggaran itu sendiri.

Hipotesis ketiga, terlihat bahwa variabel pelaksanaan anggaran (PLKSN.ANGGRN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Malahayati, 2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2020) bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran memiliki dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai prosedur dapat meningkatkan tingkat penyerapan anggaran dan mengurangi sisa anggaran yang tidak terpakai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Halim, A., & Putra, 2020) menunjukkan bahwa baik perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin dapat meminimalkan risiko anggaran tidak terserap.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM (KOMP. SDM) dan pelaksanaan anggaran (PLKSN.ANGGRN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD. Sedangkan, variabel perencanaan anggaran (PRCN.ANGGRN) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja SKPD. Secara simultan variabel Kompetensi SDM, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penyerapan Anggaran Belanja.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar dari variabel yang di teliti misalnya komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara untuk dapat mendapatkan jawaban yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja SKPD terkait proses pengadaan barang/jasa.

Keterbatasan penelitian ini yaitu kurangnya jumlah responden yang hanya 50 orang, tentu masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Sedikitnya jumlah sampel yang diambil karena keterbatasan waktu pengumpulan data dan tenaga peneliti. Kesulitan dalam memperoleh responden dan kurangnya partisipasi responden dalam mengisi kuesioner yang tidak sungguh-sungguh dengan keadaan yang sebenarnya.

## Daftar Pustaka

- Alimuddin. (2018). Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makasar. *Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Amalia, D., Setiawan, R., & Fadillah, R. (2020). Pengaruh Kompetensi SDM dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(1), 55–57.
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. DIA. *Jurnal Administrasi Publik. Jurnal Administrasi Publik.*, 14(1), 1–18.
- Ariyanto, H., & Utomo, S. (2019). Pengaruh perencanaan anggaran terhadap efektivitas penyerapan anggaran pada pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 12(2), 234–245.
- Bria, B. Y. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Hadi, S., & Sari, P. (2017). Perencanaan anggaran dan pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,

- 14(2), 101–115.
- Halim, A., & Putra, Y. (2020). Analisis pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 16(2), 145–159.
- Handayani, W. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 15(1), 45–56.
- Hasni, N. T., & B. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG. *Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen*, 13(1), 33–44.
- Hidayat, M. A., Saputra, A., & Fitria, Y. (2018). Evaluasi Penyerapan Anggaran Ditinjau dari Perspektif Kompetensi SDM dan Efisiensi Proses Administrasi. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(2), 89–101.
- Kusuma, W., & Ariani, R. (2018). Kompetensi pegawai pemerintah dan hubungannya dengan penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 134–148.
- Malahayati, et al. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- NOVIWIJAYA, Amdi and ROHMAN, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang 1). *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Pratama, Y. D., & Nugroho, A. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Publik*, 7(3), 112–125.
- Putri, A. D., Nugroho, H., & Syamsudin, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Kendala Administrasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Publik*, 9(1), 87–102.
- Ramdhani, D., & Anisa, I, Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1).
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–147.
- Rustam. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 11(2), 150–165.
- Siregar, R., & Lestari, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintahan Daerah: Studi Kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 120–135.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Andi.
- Wibowo, A., & Prabowo, H. (2022). Pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan

- anggaran di Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Publik*, 19(1), 45–60.
- Wibowo, S., & Nugroho, M. (2021). Meningkatkan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa melalui reformasi sistem e-procurement. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 13(1), 95–110.
- Widodo, A. (2020). Efektivitas pelaksanaan anggaran dan dampaknya terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 78–92.
- Zarinah, M., Darwanis., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(1).